

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2022**

KECAMATAN TOMONI TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2 Data Umum Organisasi	3
1.3 Struktur/Kondisi Organisasi	6
1.4 Peran Organisasi	7
1.5 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2022-2026.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kec. Tomoni Timur	19
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	19
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	21
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	20
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	21
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	22
Sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tomoni Timur	299
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022	299
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	31
4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	32

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	33
3.2 Realisasi Anggaran	41
BAB IV_PENUTUP	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2022	13
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah	21
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2021)	32
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	41

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Tomoni Timur dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni Timur sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni Timur, Februari 2023



BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni Timur diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Tomoni Timur 43,91 km² Kecamatan Tomoni Timur terdiri dari 8 (Delapan) Desa definitif. Adapun Desa dimaksud masing-masing :

1. Desa Margomulyo
2. Desa Kertoraharjo
3. Desa Purwosari
4. Desa Pattengko

5. Desa Cendana Hitam Timur
6. Desa Cendana Hitam
7. Desa Alam Buana
8. Desa Manunggal

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni Timur pada tahun 2022 sebanyak 13.679 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2022) dengan rincian : laki-laki sebanyak 6.751 jiwa dan perempuan sebanyak 6.628 jiwa. Penduduk Kecamatan Tomoni Timur merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni Timur yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni Timur per tanggal 31 Desember 2022 adalah 15 (limabelas) orang PNS dan 9 (sembilan) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	3	3	-	5	11
3	Golongan II	-	-	2	1	3
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	4	2	6	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	7	-	3	10
3	Golongan II	-	-	-	3	3
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		2	7	-	6	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	8	5	15
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	8	5	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4

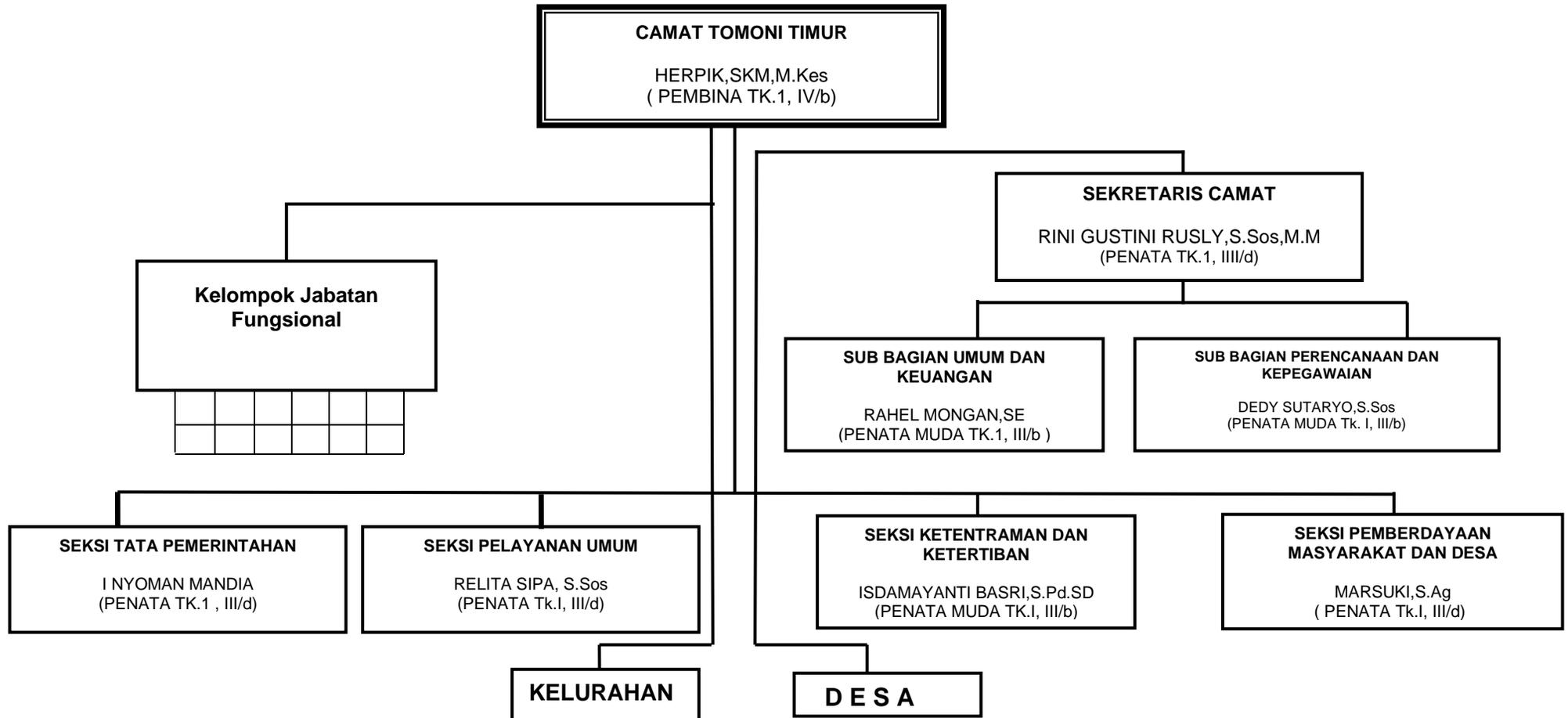
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	15
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	9
JUMLAH		24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR



1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni Timur tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni Timur yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat,diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni Timur.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

adalah :

**“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan
Nilai Agama dan Budaya”**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kecamatan

Tomoni Timur telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya, program dan kegiatan disertai indikator kinerja kegiatan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Tomoni Timur menyusun Perjanjian Kinerja, Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkup pemerintahan. Penyusunan Perencanaan Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Renja Tahun 2022 dan DPA Tahun Anggaran 2022. Kecamatan Tomoni Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Survei Kepuasan Masyarakat	87,88
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Nilai LAKIP	70,1

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2,400,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2,400,000
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	100 lembar	2,400,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	78.306.830
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	78.306.830
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	16.260.480
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	85 Orang	62.046.350
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	16.140.010
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.879.055
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100%	5.593.535

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	5.285.520
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.260.955
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	5.260.955
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	19.992.000
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	19.992.000
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	19.992.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.940.560
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	29.940.560
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	16.738.000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	8 Desa	13.202.560

Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.489.043.850
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.380.800
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	5.365.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.112.200
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	3.843.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	34.060.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.577.284.200
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	1.553.974.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	23.310.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.004.650
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	13.004.650
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	100%	10.090.000

	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100%	10.090.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	29.855.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Laporan	5.815.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	24.040.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	297.914.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	6.071.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	5.757.600
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2700 Lembar	7.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Exp	6,120,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2100 ktk	102.375.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472 Kali	169.790.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	133,634,696
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	277.750.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	18.500.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	161.559.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 surat	14.479.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rek	46.800.400
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	7.280.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 org	93.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.705.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	9.105.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	6.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	29.000.000
JUMLAH	100%	2.635.823.250

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Kantor Kecamatan Tomoni Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian IKU Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja

kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomoni Timur akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,88	91,22	103,81%	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 103,81% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2022 Kecamatan Tomoni Timur berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 78 atau melampaui target dengan nilai survei 90,65. Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- 1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya nilai **648**.

- ❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan Tomoni Timur pada unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya disebabkan karena belum adanya persyaratan yang jelas untuk setiap jenis pelayanan.
 - ❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya adalah dengan membuat papan informasi yang berisi berbagai jenis pelayanan beserta persyaratannya, sehingga masyarakat yang datang bisa langsung melihat persyaratan untuk jenis pelayanan yang akan dilakukan.
- 2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan dengan nilai **818**.
- ❖ **Faktor pendukung** kenapa Kecamatan Tomoni Timur pada unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan Tomoni Timur tekhusus pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya apapun (gratis).

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2018	70	79,35	Tinggi
2		2019	72	85	Tinggi
3		2020	75,5	85	Tinggi
4		2021	97	97	Tinggi
5		2022	87,88	91,22	Sangat Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2022 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022	2022	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,88	91,22	92,25

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2022 sebesar 91,22 atau setara dengan 103,81% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 93,02 jika Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2022 adalah 98%. Target ditahun 2022 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Tomoni Timur untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur dapat terwujud.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Perubahan Peraturan terkait Perizinan yang tidak lagi menjadi wewenang pemerintah kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Tomoni Timur dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2022 tidak ada lagi kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan, di sebabkan sejak tanggal 2 Agustus 2021 untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten. Tetapi untuk pelayanan umum lainnya masih tetap di fasilitasi di kecamatan seperti surat ahli waris, keterangan pindah penduduk, serta pengantar pembuatan KTP

❖ **Hambatan :**

a) Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan.

❖ **Solusi :**

a) Tetap melaksanakan sosialisasi terkait pelayanan perizinan terutama tata cara pengurusan perizinan dan syarat – syarat kelengkapan berkas.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

1) Koordianasi kegiatan pemberdayaan

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 40%. Musrenbang Kecamatan Tomoni Timur dilaksanakan pada Bulan 14 Februari 2022, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 56 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh

BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 16 kegiatan prioritas.

❖ **Hambatan :**

- a) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang.

❖ **Solusi :**

- a) Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 8 Desa di Kecamatan Tomoni Timur. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2022 PKK kecamatan Tomoni Timur melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma, Lomba Posyandu terintegrasi dan lomba senam lansia. Kegiatan PKK pada tahun 2022 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- a) Sumber Daya Manusia terbatas.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100 % harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Tomoni Timur. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2022 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tomoni Timur.
- b) Menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- c) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 77.

❖ **Hambatan :**

- a) Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni Timur belum maksimal.

❖ **Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 8 Rancangan Peraturan Desa dan 8 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 16 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2022, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni Timur untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes.

Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 8 Peraturan Desa (Perubahan) dan 8 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 32 Peraturan. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
 - b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
 - c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah desa dalam wilayah kecamatan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya dalam wilayah Kecamatan Tomoni Timur.

Hambatan :

- ❖ Masih ditemui pelaksanaan dan perencanaan tidak berjalan dengan baik sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal.
- ❖ Masih adanya pengaduan masyarakat terkait hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan masyarakat.

❖ **Solusi :**

- a) Memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dengan matang program – program pembagunan yang akan dilaksanakan

sehingga hasil yang di dapatkan maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target yang ingin dicapai program ini adalah terciptanya sinergitas dengan aparat Kepolisian, TNI dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda serta Instansi vertikal dan perangkat daerah alam menciptakan situasi ketentraman dan ketertiban yang aman serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah daerah.

❖ Hambatan :

- a) Tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sebabkan oleh karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya situasi aman dan damai dalam kehidupan sehari – hari. Dan juga di sebabkan oleh pengalaman warga di wilayah kecamatan ini yang sempat teribat konflik antar etnis yang membawa korban jiwa.

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur	Nilai LAKIP	65,92	70,1	55	-	83,43%	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2022 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai LAKIP Kecamatan Tomoni Timur adalah 55 (CC) dari target 65,92, ini berarti bahwa hasil yang dicapai belum maksimal, tidak mencapai target yang telah ditentukan, masih perlun banyak perbaikan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2018	-	-	-	-
2		2019	-	-	-	-
3		2020	55	60	109%	Sangat Tinggi
4		2021	65,92	55	83,43%	Sedang
5		2022	62	-	-	-

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa pada tahun 2018 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 46,71 dengan kategori C. pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 60,00 dengan kategori B. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan nilai 62,04 dengan Kategori B. sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Tomoni Timur mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2021		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Tomoni Timur	Nilai Score LAKIP (n-1)	65,92	55	65,92

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu Skor LAKIP 62,04 dengan kategori B. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2021 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Telah dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2016-2021.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni Timur telah direvisi sesuai renstra tahun 2021-2026.
- c. Evaluasi kinerja eselon sudah ada.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	3	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	6	1	2	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	7	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	9	1	1	1
8	Kasi Pelayanan Umum	1	7	1	-	4
JUMLAH		8	34	8	7	9
TOTAL		42		24		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni Timur yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur selain karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa) juga masih banyak terdapat jabatan lain yang kosong yang seharusnya terisi untuk mengoptimalkan pelayanan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen Perencanaan yang disusun oleh Kantor Kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ Hambatan :

- a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ Solusi:

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh

Kantor kecamatan Tomoni Timur, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, kendala yang dihadapi yaitu pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dan rencana pendanaan masih bersifat satu arah dimana ketertlibatan seksi dan sub bagian masih sangat minim.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- a) Menekankan kepada kepala seksi melalui Camat dan Sekcam untuk lebih berkontrobusi dalam penyusunan laporan salah satunya dengan menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
 - b) Meningkatkan komunikasi Tim LAKIP
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Tomoni Timur sebanyak 15 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni Timur.

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan Tomoni Timur dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Sejak akhir TW 2 Tahun 2021 pemerintah kecamatan sudah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi dalam hal ini retribusi pengurusan IMB disebabkan oleh karena kewenangannya sudah diambil alih oleh DPMPTSP

5) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ **Hambatan/Kendala**

Tidak ditemukan kendala dalam sub kegiatan ini, target ASN yang mengikuti pelatihan sesuai dengan target yaitu 4 orang ASN

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- c. Penyediaan bahan logistic kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi kunjungan tamu;
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Terjadi anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional camat.
- b) Kurangnya koordinasi antara PPTK dan pengurus barang terkait rencana kebutuhan barang.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

- a) Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini semua terlaksana 100% dan tepat waktu.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam kegiatan ini

- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pemeliharaan masih belum seimbang sehingga beberapa barang inventaris belum terpelihara dengan baik hal ini disebabkan oleh karena belum terinventaris dengan baik barang – barang yang masuk dalam kategori Baik, Kurang Baik dan Rusak Berat.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan inventarisasi barang yang lebih mendalam dalam menentukan kategori kondisi barang inventaris..
- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.635.823.250,- yang terdiri atas Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.553.974.200,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.099.849.050,. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.586.332.589,- dengan capaian **98,12%** yang terdiri dari realisasi Belanja pegawai sebesar Rp. 1.546.532.546,- dengan capaian 99,52% dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.039.800.043,- dengan capaian 94,54%. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2022
KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I/II/III/IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2022	CAPAIAN
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.489.043.850	2.445.826.114	98,26
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.380.800	44.317.000	91,60
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.365.100	4.402.000	82,05
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.112.200	4.700.000	91,94
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.843.500	2.330.000	60,62
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.060.000	32.885.000	96,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.577.284.200	1.564.232.546	#REF!
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.553.974.200	1.546.532.546	99,52
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	23.310.000	17.700.000	75,93

	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	13.004.650	12.765.000	98,16
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.004.650	12.765.000	98,16
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.090.000	10.090.000	100,00
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.090.000	10.090.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.855.000	27.720.000	92,85
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.815.000	5.150.000	88,56
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang undangan	24.040.000	22.570.000	93,89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.914.500	295.195.880	99,09
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.071.900	5.705.500	93,97
2	Penyediaan bahan logistik kantor	5.757.600	5.717.500	99,30
3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	7.800.000	7.380.000	94,62
4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	5.445.000	88,97
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	102.375.000	101.650.000	99,29
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	169.790.000	169.297.880	99,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.250.000	306.250.000	100,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	18.500.000	100,00

2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.750.000	277.750.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.559.700	153.115.688	94,77
1	Penyediaan jasa surat menyurat	14.479.300	14.380.775	99,32
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.400	38.484.913	82,23
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.280.000	7.250.000	99,59
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	93.000.000	93.000.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	44.705.000	42.230.000	94,46
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9.105.000	7.200.000	79,08
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.600.000	6.530.000	98,94
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	29.000.000	28.500.000	98,28
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.400.000	2.150.000	89,58
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2.400.000	2.150.000	89,58

1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2.400.000	2.150.000	89,58
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.306.830	75.210.000	96,05
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	78.306.830	75.210.000	96,05
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	16.260.480	15.870.000	97,60
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	62.046.350	59.340.000	95,64
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.140.010	15.541.475	96,29
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.879.055	10.555.520	97,03
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.593.535	5.370.000	96,00
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.285.520	5.185.520	98,11
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.260.955	4.985.955	94,77

1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.260.955	4.985.955	94,77
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.992.000	18.750.000	93,79
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	19.992.000	18.750.000	93,79
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	19.992.000	18.750.000	93,79
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.940.560	28.855.000	96,37
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29.940.560	28.855.000	96,37
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	16.738.000	16.240.000	97,02
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	13.202.560	12.615.000	95,55
TOTAL BELANJA		2.635.823.250	2.586.332.589	98,12

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 90,65 dari target 80. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023. Pada tahun 2022 Kecamatan Tomoni Timur telah menggunakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.586.332.589,- dari total pagu sebesar Rp. 2.635.823.250,- setara dengan 98,12% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tomoni Timur telah optimal.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni Timur meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja

terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni Timur, Februari 2023



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU